

# MASYARAKAT MELEK KEUANGAN SEBAGAI PRASYARAT KEUANGAN INKLUSIF

Oleh :

Haryadi <sup>1)</sup>, Tila Dela Luhita <sup>1)</sup>, Margani Pinasti <sup>1)</sup>, Dewi Susilowati <sup>1)</sup>, Agung Praptapa <sup>1)</sup>

E-mail: cicimanajemen@gmail.com

<sup>1)</sup> Economics and Business Faculty, Universitas jendral soedirman

## ABSTRACT

The level of financial literacy of a country have an impact on people's welfare. FSA survey in the year 2013 shows the low level of financial literacy of Indonesian society. During this time, the bottom of the pyramid in Indonesian society still do not feel the benefit of financial institutions. The result this time the class included in the class of the poor. Inclusive Finance is one of the ways which are supposed to distribute the benefits provided financial institutions to the bottom of the pyramid in the community. The prerequisites that must be met in order to achieve an inclusive financial community is financial literacy. Community financial literacy can be cultivated through socialization, training, mentoring and education to the community (especially the bottom of the pyramid) on parties who have competence in the field of finance. This method proved successful in improving the financial literacy rate in some countries.

**Keywords:** financial literacy, inclusive finance, the bottom of the pyramid.

## Pendahuluan

Paska krisis ekonomi global tahun 2008, masyarakat yang ada dalam kelompok the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal dan masyarakat pinggiran paling merasakan dampaknya). Kelompok ini umumnya tidak dapat mengakses layanan perbankan. Di Indonesia, kelompok ini terdiri dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), buruh migran, dan lain-lain. Keuangan inklusif memainkan peranan penting disini untuk merangkul kelompok tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 menunjukkan tingkat kemiskinan yang ada di desa sebesar 14,21%, sedangkan tingkat kemiskinan yang ada di kota 8,29%. Besarnya tingkat kemiskinan di desa,

selain dipicu minimnya pendapatan juga dipicu oleh ketidaktepatan pengelolaan keuangan. Ketidaktepatan pengelolaan keuangan ini dapat disebabkan oleh tingkat pengetahuan keuangan masyarakat desa yang sangat minim. Banjirnya akses terhadap informasi-informasi keuangan sebagai imbas revolusi teknologi di Indonesia tidak membuat akses masyarakat desa terhadap informasi keuangan lebih baik.

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Literasi keuangan penting untuk menghasilkan keputusan yang tepat, dimana individu-individu yang mempunyai pengetahuan kurang banyak mengalami berbagai macam kesalahan dalam keputusan keuangan mereka (Lusardi & Mithcell, 2014). Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata, kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Tingkat literasi keuangan yang rendah menyebabkan seseorang tidak dapat membuat anggaran yang tepat, lebih cenderung memiliki masalah dengan hutang, lebih mungkin terlibat kredit dengan biaya yang tinggi, dan memiliki kemungkinan yang kecil untuk mampu merencanakan masa depan (Lusardi, 2010).

Sayangnya, data survei OJK tahun 2013 menunjukkan masih rendahnya literasi masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa 21,84% responden tergolong well literate dan 75,69 % tergolong sufficient literate, dan hanya 2,06% responden yang less literate dan 0,41 % yang not literate; nyatanya, hasil tersebut tidak merata di setiap sektor keuangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbankan merupakan sektor yang mendominasi dalam literasi keuangan masyarakat, terlihat bahwa 75,44% responden tergolong sufficient literate. Akan tetapi, hasil survei pada sektor perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan pasar modal menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih tergolong not literate, hal tersebut mengindikasikan buruknya tingkat literasi pada ketiga sektor tersebut.

## **Literasi Keuangan**

Lusardi dan Mitchell (2007) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (knowledge and ability). Tingkat literasi keuangan dapat diketahui melalui pengetahuan yang berkaitan dengan tingkat bunga, inflasi dan difersifikasi resiko (Lusardi & Mithcell, 2014). Lusardi A. (2008) menjelaskan bahwa literasi keuangan, dalam pengukurannya, memiliki dua tingkatan yaitu dasar (basic) dan lanjutan (advance). Literasi keuangan dasar dapat diukur pengetahuan yang berkaitan dengan tingkat bunga, inflasi dan difersifikasi resiko, sedangkan literasi keuangan lanjutan diukur melalui pengetahuan tentang pasar saham, reksa dana, hubungan antara tingkat bunga dan harga obligasi, resiko, periode pengembalian dan fluktuasi aset (Lusardi A. , Annamaria Lusardy Publications, 2008). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi literasi keuangan di antaranya adalah tingkat pendidikan (Otoritas Jasa Keuangan, 2013; Lusardi, 2008), strata sosial (Otoritas Jasa Keuangan, 2013), jenis kelamin (Chen & Volpe, 2002; Lusardi, 2008), dan ras/etnis (Lusardi, 2008).

Literasi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seseorang, dan berbagai penelitian telah menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan berkaitan erat dengan kesejahteraan. Lusardi (2008) berargumen bahwa literasi keuangan berdampak pada keputusan keuangan, sehingga kurangnya literasi keuangan dapat berdampak pada kegagalan perencanaan hari tua, kurangnya partisipasi di pasar saham, dan perilaku hutang yang buruk. Disamping itu, kemampuan orang-orang yang terliterasi dalam melakukan perencanaan dan keputusan keuangan yang tepat, membuat mereka mampu mencapai kesejahteraan (Lusardi & Mitchell, 2006; Gutter & Copur, 2011) dan kepuasan (Xiao, Tang, & Shim, 2009) dalam kehidupan mereka, sehingga berpotensi untuk mensejahterakan keluarga dan orang-orang lain disekitar mereka.

## Melek Keuangan sebagai Prasyarat Keuangan Inklusif Suatu Negara

Kesadaran akan pentingnya pengetahuan dan perilaku keuangan tidak hanya dilihat dari segi individu semata. Dari sudut pandang yang lebih luas, literasi keuangan juga dapat berdampak pada perekonomian negara, dari aspek kesejahteraan masyarakatnya dan juga kemajuan lembaga-lembaga keuangannya. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menyadari pentingnya literasi keuangan dengan berkaca dari krisis keuangan yang pernah terjadi di negara tersebut. Majunya sektor keuangan di negara adidaya tersebut mendorong munculnya berbagai macam instrumen derivatif keuangan. Di sisi lain, perencanaan pensiun para pekerja lebih bergantung terutama pada Defined

Tabel 1. Indeks Literasi Keuangan di Indonesia

Tingkat Literasi	Sektor Keuangan					
	Perbankan	Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Dana Pensiun	Pasar Modal	Pegadaian
<i>Well Literate</i>	21,80%	17,84%	9,80%	7,13%	3,79%	14,85%
<i>Sufficient Literate</i>	75,44%	41,69%	17,89%	11,74%	2,40%	38,89%
<i>Less Literate</i>	2,04%	0,68%	0,21%	0,11%	0,03%	0,83%
<i>Not Literate</i>	0,73%	39,80%	72,10%	81,03%	93,79%	45,44%

Sumber: hasil survei Otoritas Jasa Keuangan 2013 (OJK, 2013)

Contribution yang kompensasinya bergantung pada uang yang diinvestasikan pada akun peserta program dan performa investasinya (Lusardi & Mithcell, 2014). Belum lagi variasi produk lain seperti pinjaman pelajar, hipotek, kartu kredit, dan lain sebagainya.

Kenyataannya, masyarakat di negara kita juga menghadapi kompleksnya pilihan layanan-layanan keuangan yang tersedia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengkategorikan lembaga-lembaga keuangan yang ada kedalam lima sektor yaitu perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan (finance), dana

pensiun, pasar modal dan pegadaian. Masing-masing lembaga keuangan tersebut menyediakan berbagai jenis layanan keuangan yang ditawarkan pada masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat perlu memilah secara cerdas instrumen-instrumen keuangan yang dapat dimasukkan kedalam portofolio investasi, proteksi dan pembiayaan mereka.

Sayangnya, data survei OJK tahun 2013 yang dapat dilihat pada Tabel 1 menunjukkan masih rendahnya literasi masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa 21,84% responden tergolong well literate dan 75,69 % tergolong sufficient literate, dan hanya 2,06% responden yang less literate dan 0,41 % yang not literate; nyatanya, hasil tersebut tidak merata di setiap sektor keuangan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbankan merupakan sektor yang mendominasi dalam literasi keuangan masyarakat, terlihat bahwa 75,44% responden tergolong sufficient literate. Akan tetapi, hasil survei pada sektor perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan pasar modal menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih tergolong not literate, hal tersebut mengindikasikan buruknya tingkat literasi pada ketiga sektor tersebut.

Padahal, tingkat literasi keuangan masyarakat juga dapat menciptakan efek berantai yang berakhir pada meningkatnya daya saing lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Dimana, kesadaran dan perilaku keuangan berdampak pada tingkat penggunaan produk lembaga-lembaga keuangan, yang kemudian dapat meningkatkan profitabilitas lembaga-lembaga tersebut dan mendorong mereka untuk berinovasi dalam mengembangkan produk dan jasa keuangan yang lebih bervariasi, terjangkau dan menguntungkan bagi setiap golongan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa sektor jasa keuangan yang kokoh sangat dibutuhkan dalam liberalisasi<sup>1</sup> sektor jasa keuangan yang tercakup dalam cetak biru AEC (ASEAN Economic Community) yang dilakukan melalui ASEAN Framework Agreement of Service (Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, 2012).

Maka, jelaslah bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan edukasi keuangan yang memadai. Bukan hanya untuk menjelaskan manfaat-manfaat dari jasa keuangan, namun juga untuk memberi pemahaman tentang resiko-

resiko dan biaya-biaya penggunaan layanan keuangan baik dari lembaga formal maupun lembaga non-formal. Dalam usaha tersebut, pemberdayaan mahasiswa merupakan praktik yang banyak dilakukan di negara-negara maju melalui program-program student volunteer, seperti Syracuse University dengan program student to student, George Washington School of Business dengan gerakan sukarela yang melibatkan mahasiswa, staff dan alumni, dan University of Nebraska-Lincoln melalui volunteer program bagi mahasiswa untuk mempromosikan, menulis artikel, mengajar, desainer buletin atau menjadi social media ambassador tentang pengelolaan keuangan

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Literasi keuangan penting untuk menghasilkan keputusan yang tepat, dimana individu-individu yang mempunyai pengetahuan kurang banyak mengalami berbagai macam kesalahan dalam keputusan keuangan mereka (Lusardi & Mithcell, 2014). Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata, kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Tingkat literasi keuangan yang rendah menyebabkan seseorang tidak dapat membuat anggaran yang tepat, lebih cenderung memiliki masalah dengan hutang, lebih mungkin terlibat kredit dengan biaya yang tinggi, dan memiliki kemungkinan yang kecil untuk mampu merencanakan masa depan (Lusardi, 2010).

Menurut Chen dan Volpe (1998), literasi keuangan memiliki 4 aspek utama yaitu pengetahuan umum, tabungan, asuransi dan investasi yang sesuai dengan pengelolaan keuangan pribadi. Menurut Jhonson (2007) pendidikan keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk memiliki kemampuan memahami, menilai, dan bertindak dalam kepentingan keuangan mereka. Hal ini diperkuat oleh penelitian Lutfi dan Iramani (2008) yang menyatakan bahwa pendidikan manajemen keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap literasi finansial. Oleh karena itu, literasi keuangan yang memadai merupakan salah satu bekal penting bagi masyarakat untuk dapat menata kehidupan mereka, serta agar dapat mensejahterakan diri, keluarga dan lingkungan sekitar mereka.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2011, 63,21% komposisi penduduk miskin ada di desa, sedangkan di kota ada 36,79% penduduk miskin. Besarnya tingkat kemiskinan di desa, selain dipicu minimnya pendapatan juga dipicu oleh ketidaktepatan pengelolaan keuangan personal. Ketidaktepatan pengelolaan keuangan personal ini dapat disebabkan oleh tingkat pengetahuan keuangan masyarakat desa yang sangat minim. Banjirnya akses terhadap informasi-informasi keuangan sebagai imbas revolusi teknologi di Indonesia tidak membuat akses masyarakat desa terhadap informasi keuangan lebih baik.

Strategi Keuangan Inklusif oleh Bank Indonesia (BI) sejak tahun 2012 dan Strategi Nasional Literasi Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2013 telah menyerukan pentingnya pendidikan keuangan masyarakat. Selain untuk meningkatkan daya saing sektor keuangan dalam menghadapi liberalisasi sektor jasa keuangan, pendidikan keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengingat rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia dibanding dengan negara lain (Choong, 2013; Visa, 2012; Wibowo, 2013).

### **Kesimpulan**

Negara-negara yang secara perekonomian maju, memiliki masyarakat dengan tingkat melek keuangan yang tinggi. Pekerjaan rumah bagi Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya masih kurang terliterasi dalam keuangan. Selama ini, the bottom of the pyramid dalam masyarakat Indonesia masih belum merasakan manfaat lembaga keuangan. Hasilnya saat ini golongan tersebut termasuk dalam golongan masyarakat miskin. Keuangan inklusif adalah salah satu cara yang dianggap dapat mendistribusikan manfaat yang diberikan lembaga keuangan kepada the bottom of the pyramid dalam masyarakat. Prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keuangan inklusif adalah masyarakat yang melek keuangan. Masyarakat melek keuangan dapat diusahakan lewat sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan pendidikan kepada masyarakat (terutama the bottom of the pyramid) dari pihak-pihak yang

memiliki kompetensi dalam bidang keuangan. Jika prasyarat angka melek keuangan yang tinggi telah dapat dipenuhi, tidak mustahil Indonesia akan berhasil dengan keuangan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada 30 Agustus 2016
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *Financial Service Review*, 7 (2), 107-128.
- Choong, D. (2013). Mastercard Index of financial Literacy Report (2013H1). Retrieved 1 6, 2015, from Mastercard Website: [www.masterintelligence.com](http://www.masterintelligence.com)
- Gutter, M., & Copur, Z. (2011). financial Behavior and Financial Well-Being of College Students: Evidence from a National Survey. *Journal of Family and Economic Issues*, 32, 699-714.
- Lusardi, A. (2008, June). Annamaria Lusardy Publications. Retrieved January 21, 2014, from [dartmouth website: http://www.dartmouth.edu/~alusardi/Papers/Lusardi\\_Informed\\_Consumer.pdf](http://www.dartmouth.edu/~alusardi/Papers/Lusardi_Informed_Consumer.pdf)
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2006, October). Annamaria Lusardi Publications. Retrieved January 21, 2014, from Dartmouth website: <http://www.dartmouth.edu/~alusardi/Papers/FinancialLiteracy.pdf>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). Baby Boomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth. *Journal of Monetary Economics*, 54, 205-224.
- Lusardi, A., & Mithcell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52 (1), 5-44.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Beranda. Retrieved October 27, 2014, from Informasi dan Edukasi Konsumen Keuangan OJK: <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/public/content/files/SNLKI.pdf>
- Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Weigner, D. M. (2009). *Psychology* (1st Edition ed.). New York: Worth Publisher.
- Shasha, H. (2008). Influencing Factors - a case study of rural households in Huayanxi Villages in Hunan Province. *China Rural Survey*, 01.
- Shih, T.-Y., & Ke, S.-C. (2013). Determinates of Financial behavior: Insights into Consumer Money Attitudes and Financial Literacy. *Service Business*, 8, 217-238.
- Susman, G. I., & Evered, R. D. (1978). An Assessment of the Scientific Merits of Action Research. *Administrative Science Quarterly*, 23 (4), 582-603.
- Visa. (2012). Visa's International Financial Literacy Barometer 2012. Retrieved January 6, 2015, from Practical Money Skills for Life: <http://www.practicalmoneyskills.com>
- Wibowo, P. P. (2013). Financial Education for Financial Inclusion: The Indonesian. India-OECD-World Bank Region Conference on Financial Education (pp.



- 13-21). New Delhi: Organisation for Economics Co-operation and Development.
- Xiao, J. J., Serido, J., & Shim, S. (2012). Financial Education, Financial Knowledge and Risky Credit Behavior of College Students. In D. J. Lamdin, Consumer Knowledge and Financial Decisions: Life Span Perspectives (pp. 113-128). New York: Springer Science+Business Media.
- Xiao, J. J., Tang, C., & Shim, S. (2009). Acting for Happiness : Financial Behavior and Live Satisfaction of College Students. *Social Indicators Research*, 92, 53-68.